PERSPEKTIF HADIS TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Aan Supian*

Abstrak

Tulisan ini berangkat dari dasar pemikiran bahwa secara normatif hadis telah memberikan kerangka nilai yang ideal dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi (clean government). Kualitas hadis tentang tindak pidana korupsi termasuk kategori sahih lidzatihi, karena hadis tersebut telah memenuhi kaedah kesahihan sanad dan matan. Kedua; terma yang lazim digunakan dalam hadis yang bisa dihubungkan dengan tindakan korupsi adalah "ghulul" (penggelapan). Meski dalam konteks awal kemunculannya, terma ini dihubungkan dengan penggelapan harta rampasan perang, dalam pandangan peneliti maknanya bisa dikembangkan dengan menggelapkan harta kekayaan negara. Ketiga, terdapat dua jenis sanksi yang seharusnya diterima oleh pelaku korupsi, yakni sanksi teologis yang akan diterima di akhirat, dan sanksi moral.

Dalam perspektif hadis, ancaman bagi pelaku korupsi (ghulul) antara lain: 1) Allah akan membelenggu pelaku korupsi, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban, ia akan membawa harta hasil korupsinya pada hari kiamat; 2) pelaku korupsi akan memperoleh kehinaan dan siksa api neraka; 3) Nabi saw. tidak berkenan mensalahkan jenazah yang terlibat korupsi; 4) Allah swt. tidak akan menerima sadaqah seseorang yang bersumber dari harta korupsi. Untuk konteks Indonesia, sanksi hukum bagi pelaku korupsi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci: *Hadis, Korupsi, Kritik Sanad, Kritik Matan.*

Pendahuluan

Islam sebagai sistem nilai mencakup segala aspek kehidupan manusia. Agama ini tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan sosial antar manusia dan mengatur manusia dengan lingkungannya. Alquran juga memerintahkan agar umat Islam melaksanakan ajaran Islam seutuhnya.¹ Salah satu aspek ajaran Islam yang berkenaan hubungan horizontal antar manusia adalah nilai-nilai dalam kehidupan politik. Konsekwensi logis ajaran ini, umat Islam dituntut memperjuangkan dan menegakkan negara secara baik dan bertanggung jawab,

meskipun Alquran tidak menjelaskan secara detail dan tegas tentang pendirian suatu negara dan bentuk pemerintahan yang harus dibentuk. Harun Nasution menyebutkan bahwa Alquran hanya mengandung prinsip-prinsip dalam menjalankan pemerintahan.² Diantara prinsip-prinsip tersebut adalah kejujuran (*al-amanah*),³ keadilan (*al-'adalah*),⁴ persaudaraan (*al-ukhuwah*),⁵ menghargai kemajemukan (*al-ta'dduddiyah*),⁶ persamaan (*al-musawah*),⁷ permusyawaratan (*al-syura*),⁸ perdamaian (*al-silm*)⁹ dan kontrol atau pengawasan (*amr bi al-ma'ruf nahi 'an al-munkar*).¹⁰

Hadis Nabi saw. yang berfungsi sebagai *tabyin* (penjelas) terhadap

*Penulis adalah Dosen FUAD IAIN Bengkulu

Alquran, tidak sedikit juga memuat prinsip-prinsip dan landasan etika pemerintahan dalam Islam. Nabi Muhammad saw. diutus sebagai *uswatun hasanah*¹¹, yang memiliki misi sebagai *rahmatan li al-'alamin*.¹² Oleh karenanya, setiap muslim wajib meneladani perilaku Nabi saw. baik dalam kehidupan individu, dalam membina keluarga maupun dalam membangun kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

Salah satu nilai etis dalam pemerintahan yang menjadi tuntunan Nabi saw adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan terbebas dari korupsi. Terkait hal ini, dalam hadis Nabi saw. dijelaskan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَمَلَ مِنْكُمْ لَنَا عَلَى عَمَلٍ فَكُنْتُمْ مِنْهُ مَخِيطًا فَمَا فَوْقَهُ فَهُوَ غُلٌّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَسْوَدٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْبِلْ عَنِّي عَمَلَكَ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ وَأَنَا أَقُولُ ذَلِكَ مَنْ اسْتَعْمَلَنَا عَلَى عَمَلٍ فَلْيَأْتِ بِغَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَهُ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى - رواه ابوداود¹³

Artinya:

"Wahai umat manusia, barangsiapa yang di antara kalian disertai jabatan untuk mengurus pekerjaan, kemudian menyembunyikan sebuah jarum atau lebih dari itu dari kami, maka hal itu adalah sebuah pengkhianatan yang akan ia bawa pada Hari Kiamat." Kemudian seorang laki-laki anshar berkulit hitam berdiri seakan aku pernah melihatnya, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, terimalah dariku pekerjaan anda! Beliau bersabda: "Apakah itu?" laki-laki itu menjawab, "Saya mendengar anda mengatakan demikian dan demikian." Beliau bersabda: "Dan aku katakan: Barangsiapa yang kami beri jabatan untuk melakukan suatu pekerjaan maka hendaknya ia melakukan yang sedikit dan yang banyak! Lalu apa yang

diberikan kepadanya boleh ia mengambilnya, dan apa yang dilarang darinya maka ia tinggalkan."

Kutipan hadis di atas menunjukkan bahwa dalam kitab hadis ditemukan sejumlah informasi dan pesan-pesan nilai keagamaan yang semestinya menjadi acuan dan rujukan, sekaligus menjadi pedoman dan landasan moral dalam menjalankan roda pemerintahan yang terbebas dari korupsi. Melalui kajian ini diharapkan hadis-hadis yang masih terpisah-pisah dalam berbagai kitab hadis dapat diidentifikasi dan diklasifikasi sehingga melahirkan suatu tema, khususnya seputar hadis-hadis tentang tindak pidana korupsi.

A. Sekilas tentang Tindak Pidana Korupsi

Secara etimologis, istilah korupsi berasal dari kata Latin *corrumpere*, *corruptio*, atau *corruptus*. Secara harfiah kata ini berarti penyimpangan dari kesucian (*profanity*), tindakan tak bermoral, kejahatan, kebusukan, kerusakan, ketidakjujuran, kecurangan, dapat disuap, tidak bermoral, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Berdasarkan makna harfiah ini, dapat disebutkan bahwa istilah korupsi memiliki konotasi makna berupa tindakan-tindakan yang rendah, hina dan tidak bermoral. Dalam perkembangannya istilah Latin ini diadopsi menjadi dan memperkaya perbendaharaan kata bahasa-bahasa di wilayah Eropa Barat; Inggris: *corrupt*, *corruption*; Prancis: *corruption*; Belanda: *korruptie*.¹⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah korupsi diartikan secara terbatas sebagai "penyelewengan atau

penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain".¹⁵

Sementara dalam kamus hukumnya, Andi Hamzah mengartikan korupsi dalam makna yang lebih umum dari makna yang diberikan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, sesuai dengan makna harfiah kata ini. Menurut Andi Hamzah korupsi adalah suatu perbuatan buruk, busuk, bejat, suka disuap, perbuatan yang menghina atau menfitnah, menyimpang dari kesucian, tidak bermoral.¹⁶ Sedangkan Baharuddin Lopa mengartikan korupsi sebagai "the offering and accepting of bribes" (pemberian dan penerimaan hadiah-hadiah berupa suap). Ia juga mengartikan korupsi dengan "decay", kebusukan dan kerusakan, yakni kebusukan dan kerusakan moral.¹⁷

Pada awalnya, istilah korupsi di Indonesia diterjemahkan dengan konteks makna yang terbatas berupa tindakan penggelapan uang negara dan merupakan istilah yang hanya terkandung dalam khazanah perbincangan umum, untuk menunjukkan berbagai bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara. Dalam perkembangannya, istilah ini kemudian menjadi perbincangan dalam masalah-masalah kenegaraan, terutama karena pemerintah memandang bahwa tindakan korupsi bisa menghambat kelancaran tugas-tugas pemerintahan dan merupakan tindakan yang bisa merugikan ekonomi negara. Hal inilah yang melatari lahirnya perumusan peraturan khusus menyangkut korupsi yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga istilah korupsi menjadi sebuah istilah teknis yuridis.¹⁸

B. Hadis- hadis yang berkaitan dengan tindak Pidana Korupsi

hadis-hadis tentang larangan korupsi dapat diidentifikasi sebagai berikut:

(1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَارِثٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اسْتَعْمَلَنَا مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَنَمْنَا مَخِطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدُ مِنَ الْأَنْصَارِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْبَلْ عَنِّي عَمَلِكَ قَالَ وَمَا لَكَ قَالَ سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ وَأَنَا أَقُولُهُ الْآنَ مَنْ اسْتَعْمَلَنَا مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِئْ بِقَلْبِهِ وَكَبِيرِهِ فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْخَطْلَبِيُّ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ أَبِي حَارِثٍ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِمِثْلِ خَدِيثِهِمْ - رواه مسلم¹⁹

(2) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ حَدَّثَنِي قَيْسُ قَالَ حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ عُمَيْرَةَ الْكِنْدِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَمَلَ مِنْكُمْ لَنَا عَلَى عَمَلٍ فَكَنَمْنَا مِنْهُ مَخِطًا فَمَا فَوْقَهُ فَهُوَ غُلٌّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَسْوَدُ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْبَلْ عَنِّي عَمَلِكَ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ وَأَنَا أَقُولُ ذَلِكَ مَنْ اسْتَعْمَلَنَا عَلَى عَمَلٍ فَلْيَأْتِ بِقَلْبِهِ وَكَبِيرِهِ فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَهُ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى - رواه ابوداود²⁰

(3) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسُ عَنْ عَدِيِّ ابْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَمَلَ مِنْكُمْ لَنَا عَلَى عَمَلٍ فَكَنَمْنَا مِنْهُ مَخِطًا فَمَا فَوْقَهُ فَهُوَ غُلٌّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَسْوَدُ قَالَ مُجَالِدٌ هُوَ سَعْدُ بْنُ عَبَادَةَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْبَلْ عَنِّي عَمَلِكَ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا

وَكَذَا قَالَ وَأَنَا أَقُولُ ذَلِكَ الْآنَ مَنْ اسْتَعْمَلَنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِيْ
 بِقَلْبِيْهِ وَكَثِيْرِهِ فَمَا أُوتِيْ مِنْهُ أَخَذَهُ وَمَا نُهِيْ عَنْهُ انْتَهَى - رواه
 احمد²¹

(4) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ سَمِعْتُ
 قَيْسًا يُحَدِّثُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَنَّهُ قَالَ مَنْ اسْتَعْمَلَنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمْنَا مِنْهُ مَخِيْطًا فَهُوَ غُلٌّ
 يَأْتِيْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ آدَمُ طَوَالَ مِنَ الْأَنْصَارِ
 فَقَالَ لَا حَاجَةَ لِي فِي عَمَلِكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ لِمَ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُكَ أَنْفًا تَقُولُ قَالَ فَأَنَا أَقُولُ الْآنَ مَنْ
 اسْتَعْمَلَنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَأْتِ بِقَلْبِيْهِ وَكَثِيْرِهِ فَإِنْ أَتَى بِشَيْءٍ
 أَخَذَهُ وَإِنْ نُهِيْ عَنْهُ انْتَهَى - رواه احمد²²

C. Analisis Kandungan Hadis

Pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*) merupakan cita-cita semua elemen bangsa, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Diantara indikator yang mencerminkan pemerintahan yang bersih adalah terbebasnya aparat pemerintah dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.²³ Perilaku korup dan aktivitas sejenisnya ditengarai dapat menghambat tujuan pembangunan dan merupakan perilaku yang menyalahi etika.

Praktek korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud memperkaya diri sendiri dan atau orang lain. Upaya memperkaya diri sendiri dilakukan dengan cara melawan hukum, yang berakibat pada tindakan yang dapat merugikan kepentingan umum. Korupsi pada umumnya dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan. Oleh karenanya karakteristik korupsi selalu berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan, kendati

korupsi tidak sedikit juga dilakukan oleh aparat biasa.

Dalam konteks hadis, istilah korupsi sering dihubungkan dengan term *ghulul* (penggelapan). Namun dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk dalam kategori korupsi adalah *risywah* (penyuapan) dan *hadiyyah* (gratifikasi).²⁴ Dalam pembahasan ini, penulis akan memaparkan korupsi dalam term *ghulul* (penggelapan). Salah satu hadis yang menunjukkan pemahaman adanya tindakan korupsi, dengan menggunakan term *ghulul* (penggelapan) dan derivasinya adalah redaksi hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ حَدَّثَنِي قَيْسٌ قَالَ
 حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ عَمِيْرَةَ الْكِنْدِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَمَلَ مِنْكُمْ لَنَا عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمْنَا مِنْهُ مَخِيْطًا فَمَا
 فَوَقَّهَ فَهُوَ غُلٌّ يَأْتِيْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَسْوَدُ كَأَنِّي
 أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَقْبَلَ عَنِّي عَمَلِكَ أَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ
 سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ وَأَنَا أَقُولُ ذَلِكَ مَنْ اسْتَعْمَلَنَاهُ عَلَى عَمَلٍ
 فَلْيَأْتِ بِقَلْبِيْهِ وَكَثِيْرِهِ فَمَا أُوتِيْ مِنْهُ أَخَذَهُ وَمَا نُهِيْ عَنْهُ انْتَهَى - ابو
 داود²⁵

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Isma'il bin Abu Khalid telah menceritakan kepadaku Qais ia berkata; telah menceritakan kepadaku 'Adi bin 'Umairah al-Kindi bahwa Rasulullah saw. bersabda: Wahai sekalian manusia, barangsiapa yang di antara kalian disertai jabatan untuk mengurus pekerjaan, kemudian menyembunyikan (menggelapkan) sebuah jarum atau lebih dari itu dari kami, maka hal itu adalah sebuah pengkhianatan yang akan ia bawa pada hari kiamat. Kemudian seorang laki-laki Anshar berkulit hitam berdiri seakan aku pernah melihatnya, lalu ia berkata, Wahai Rasulullah, terimalah

dariku pekerjaan Anda! Beliau bersabda: Apakah itu? Laki-laki itu menjawab, "Saya mendengar anda mengatakan demikian dan demikian." Beliau bersabda: "Dan aku katakan: Barangsiapa yang kami beri jabatan untuk melakukan suatu pekerjaan maka hendaknya ia melakukan yang sedikit dan yang banyak! Lalu apa yang diberikan kepadanya boleh ia mengambilnya, dan apa yang dilarang darinya maka ia tinggalkan".

(HR. Abu Dawud)

Term yang digunakan untuk menyebutkan tindakan korupsi berdasarkan hadis di atas adalah *ghulul* (penggelapan). Kata *ghulul* berasal dari kata kerja *galla-yagullu*, makna dasarnya adalah memakai sesuatu dan berada di tengah-tengah (*al-galal ashluh tadri'u al-syai'u wa tawsatuh*). Kata *al-galal* juga bermakna air yang mengalir di celah-celah pohon (*al-galal li al-ma'i al-jar bain al-syajr*). Makna lain *Al-ghulul* adalah *tadri'u al-khiyanah wa al-gillu al-'adawah* (*al-ghulul* adalah terbiasa melakukan khianat dan *al-gullu* berarti permusuhan).²⁶ Dalam kitab *Mu'jam al-Wasith*, dijelaskan *ghulul* berasal dari kata kerja *galla-yagullu*, dan dimaknai dengan "berkhianat terhadap harta rampasan perang".²⁷ Makna yang hampir senada, *al-ghulul* dimaknai mengambil sesuatu dan menyembunyikan sesuatu itu dalam hartanya (*Akhdz al-syai'i wa dassahu fi mata'ih*).²⁸

Dalam kitab *Syarh Sahih Muslim*, al-Nawawi menjelaskan bahwa makna asal dari *ghulul* adalah berkhianat. Makna ini kemudian dispesifikasikan dengan pengkhianatan terhadap harta rampasan perang, dengan cara menyembunyikan (mengggelapkan) harta tersebut dan tidak menyerahkannya kepada pihak yang berwewenang (pemerintah/*bait al-mal*).²⁹

Secara material, benda yang disembunyikan berdasarkan hadis di atas terhitung sangat kecil, yakni hanya sebuah jarum atau benda di atasnya. Klausula *fama fauqahu*, bisa dipahami dengan benda dalam jumlah sedikit atau banyak dan benda ukuran yang kecil maupun besar.³⁰ Dari klausula tersebut juga dapat dipahami bahwa benda yang disembunyikan dan diambil oleh seseorang tersebut tidak hanya sebuah jarum, tetapi dapat berupa benda dalam jenis dan bentuk yang lainnya.

Ghulul dalam arti berkhianat dalam pembagian harta rampasan perang juga disebutkan dalam Q.S. Ali 'Imran/3: 161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغْلُفَ وَمَنْ يَغْلُفْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya :

Dan tidak mungkin seorang Nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barang siapa berkhianat niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi.³¹

Para ulama menghubungkan ayat ini dengan peristiwa perang Uhud. Menurut sebagian ulama, salah satu petaka dalam perang Uhud adalah perilaku khianat sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Al-Biqā'i menjelaskan bahwa pihak kaum muslimin (khususnya pemanah) bergegas meninggalkan posisi mereka untuk mengambil (menyembunyikan) harta rampasan perang (*ghanimah*) sebelum waktunya.³² Oleh karena sikap khianat ini pasukan kaum muslimin mengalami kekalahan

dalam peperangan, mereka tidak memperoleh pertolongan Allah swt. Dengan demikian dapat disebutkan bahwa dalam perspektif hadis, menjauhi tindakan khianat merupakan prasyarat utama bagi kehadiran pertolongan Allah.³³

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa pada awalnya istilah *ghulul* hanya dipahami sebagai tindakan pengambilan, penggelapan, berlaku curang dan khianat terhadap harta rampasan perang. Pengertian *ghulul* selanjutnya diperluas maknanya untuk berbagai tindakan curang atau perilaku menggelapkan kekayaan dan aset-aset lainnya, seperti tindakan penggelapan uang kas negara, mengambil harta kekayaan negara yang bukan menjadi haknya.

Beberapa hadis yang semakna tentang tindak pidana korupsi diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, al-Tirmidzi, dan Ahmad bin Hanbal. Dalam beberapa riwayat lain disebutkan bahwa konteks hadis yang menggunakan term *ghulul* ditemukan dalam beberapa kasus antara lain:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَيْنِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوْفِيَ يَوْمَ خَيْبَرَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ فَتَغَيَّرَتْ وَجُوهُ النَّاسِ لِذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ صَاحِبِكُمْ غَلٌّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَفَتَشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا خَزْرًا مِنْ خَزْرِ يَهُودٍ لَا يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ - رواه ابو داود ³⁴

Artinya:

Dari Zaid bin Khalid al-Juhani bahwa seorang sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam meninggal pada saat perang Khaibar. Kemudian para sahabat menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah saw.. Lalu beliau berkata: "Salatkan sahabat kalian!" kemudian roman wajah orang-orang berubah karena hal

tersebut. Lalu beliau berkata: "Sesungguhnya sahabat kalian telah berbuat berkhianat di jalan Allah." Kemudian kami memeriksa barangnya, dan kami dapati butiran mutiara Yahudi yang tidak sampai senilai dua dirham. (HR. Abu Daud).

Dalam kasus lainnya Rasulullah bersabda:

عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ حَدَّثَنِي ثَوْرٌ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ افْتَسَخْنَا خَيْبَرَ وَلَمْ نَعْمَ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً إِنَّمَا غَنِمْنَا الْبَقَرَ وَالْإِبِلَ وَالْمَتَاعَ وَالْحَوَائِطَ ثُمَّ انْصَرَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى وَادِي الْقَرْيَةِ وَمَعَهُ عَبْدٌ لَهُ يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ أَهْدَاهُ لَهُ أَحَدُ بَنِي الصَّبَابِ فَيَتِيمًا هُوَ يَحْطُ رَجُلٌ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ سَهْمٌ عَائِرٌ حَتَّى أَصَابَ ذَلِكَ الْعَبْدَ فَقَالَ النَّاسُ هَيْبًا لَهُ الشَّهَادَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ وَاللَّيِّ نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَصَابَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَابِسُ لِتَشْتَعَلَ عَلَيْهِ نَارًا فَجَاءَ رَجُلٌ جِينٌ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِرَاكِ أَوْ بِشِرَاكَيْنِ فَقَالَ هَذَا شَيْءٌ كُنْتُ أُصْبِتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِرَاكِ أَوْ بِشِرَاكَيْنِ مِنْ نَارٍ - رواه البخارى ³⁵

Artinya:

Dari Malik bin Anas katanya; telah menceritakan kepadaku TSaur katanya; telah menceritakan kepadaku Salim, maula Ibnu Muthi' ia mendengar Abu Hurairah r.a. mengatakan; "Kami menaklukkan Khaibar dan tidak kami peroleh ghanimah berupa emas dan tidak pula perak, ghanimah yang kami peroleh hanyalah berupa sapi, unta, perbekalan, dan kebun-kebun. Kemudian kami pergi bersama Rasulullah saw. ke Wadi al-Qura dan beliau didampingi seorang budaknya yang bernama Mid'am, budak yang dihadiahkan oleh salah seorang Bani Dubab. Ketika ia sedang menurunkan barang-barang bawaan unta muatannya, ia terkena anak panah yang menyasar sehingga budak itu tewas. Karenanya, para sahabat berkomentar; 'Duhai alangkah senangnya dia memperoleh kesyahidan.' Rasulullah saw. menampik

ucapan mereka dengan bersabda: 'Bahkan demi Dzat yang diriku berada di tangan-Nya, bahwasanya kain mantel (syamlah) yang diambilnya saat perang Khaibar dari barang-barang ghanimah yang belum resmi dibagi, akan menyalakan api baginya.' Spontan ada seseorang membawa satu tali sandal (syirak) atau sepasang tali sandal setelah mendengar komentar Rasulullah saw. tersebut. Selanjutnya orang itu berkata; 'Aku mendapatkan tali sandal ini.' Rasulullah saw. langsung berkomentar: Satu atau sepasang tali sandal neraka.'

Selain hadis-hadis di atas, Rasulullah saw. juga bersabda:

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ صَدَقَةً مِنْ
غُلُولٍ وَلَا صَلَاةٍ بِغَيْرِ طَهْوَرٍ - ابوداود³⁶

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Abu al-Malih dari Ayahnya dari Nabi saw., beliau bersabda: "Allah 'Azza wa Jalla tidak menerima sedekah dari harta ghulul (harta rampasan perang yang dicuri) dan juga tidak menerima shalat tanpa bersuci."

Hadis di atas dengan tegas memberikan ancaman kepada siapa saja yang berperilaku khianat terhadap amanah pekerjaan atau jabatan tertentu, yang diberikan kepadanya. Ancaman tersebut tidak hanya ditujukan kepada pelaku pengkhianatan dengan cara menyembunyikan sesuatu yang secara materi berjumlah besar, tetapi juga dalam bentuk sesuatu barang yang mungkin dianggap sepele dan kecil, semisal penggelapan sebuah jarum, mantel (jubah) atau perhiasan yang bernilai tidak lebih 2

dirham, sebagaimana gambaran hadis di atas. Perbuatan demikian dalam konteks hadis di atas termasuk *ghulul*, yang merupakan bagian dari tindakan korupsi.

Sanksi atau hukuman bagi pelaku *ghulul* sebagaimana dijelaskan di atas adalah dalam bentuk ancaman siksaan neraka dan sanksi moral. Dalam beberapa hadis secara eksplisit dikemukakan beberapa bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku *ghulul*, antara lain: Pertama, barang-barang yang dikorupsi, seperti kuda, unta atau kambing akan didatangkan dalam keadaan leher terikat pelaku, sambil mengeluarkan suara.³⁷ Kedua, seorang koruptor yang menggelapkan *syamlah* (mantel) dan sejenisnya akan memperoleh sulutan/percikan api neraka. Ketiga, seorang koruptor yang menggelapkan perhiasan senilai tidak lebih dari 2 dirham, Rasulullah saw. tidak berkenan menshalatkannya. Keempat, Allah swt. Tidak menerima sadaqah seseorang yang dihasilkan dari harta korupsi. Para ulama umumnya menghukumi tindakan pengkhianatan (pengambilan) terhadap harta hasil rampasan perang dengan hukum haram, dan termasuk pada perbuatan dosa besar.³⁸

Berdasarkan data hadis dan uraian yang terkandung dalam syarahnya, sanksi hukum di dunia bagi pelakukorupsi tidak dijelaskan secara eksplisit. Dengan demikian, dalam perspektif fikih jinayah sanksi hukum bagi pelaku korupsi adalah *takzir*, yang tingkat kepantasan hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada pihak pemerintahan yang berkuasa.

D. Pengembangan Pemahaman Hadis: Regulasi dan Upaya Penanggulangan

Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Secara teknis, terminologi korupsi sebagaimana yang dipahami dewasa ini, memang belum ditemukan pada awal-awal perkembangan Islam, khususnya pada masa Nabi saw. Namun perilaku menyimpang dan curang yang mendekati tindakan korupsi, misalnya dalam bentuk tindakan menyembunyikan atau menggelapkan harta rampasan perang (*ghanimah*) sudah ditemukan dan banyak terjadi pada masa Nabi saw., kendati kasus penyimpangan yang dilakukan secara nominal sangat kecil. Kendati kerugian yang ditimbulkan jika dinilai secara nominal tidak terlalu besar, namun sanksi yang diberikan oleh Nabi saw., dapat dikategorikan sanksi yang cukup berat, baik sanksi di akhirat maupun sanksi moral yang diberikan di dunia.

Berdasarkan perspektif hadis sebagaimana telah dijelaskan, secara teologis sanksi yang akan diberikan kepada pelaku korupsi di akhirat nanti antara lain: Allah swt. akan mempermalukan pelaku korupsi dengan cara memperlihatkan secara transparan segala sesuatu yang diperolehnya melalui tindakan korupsi dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di pengadilan akhirat. Sementara itu, sanksi moral yang diberikan Rasulullah saw. kepada pelaku korupsi antara lain beliau tidak berkenan menyalatkan jenazah seseorang yang terbukti telah mengambil harta *ghanimah* secara tidak sah. Sanksi moral lainnya yang pernah diberikan Rasulullah terhadap pelaku korupsi misalnya terjadi dalam kasus terbunuhnya seorang hamba sahaya bernama Mid'am pada suatu tempat, bernama Wadi al-Qura. Ketika itu

para sahabat serentak mendoakan "semoga dia masuk surga". Mendengar doa para sahabat ini, Rasulullah justru bersabda bahwa demi Tuhan yang diriku berada dalam kekuasaan-Nya, sesungguhnya mantel yang diambilnya pada waktu penaklukan Khaibar dari harta rampasan perang yang belum dibagikan secara sah, akan menyulut api neraka yang akan membakarnya.

Jika dibandingkan dengan konteks kasus korupsi di Indonesia dewasa ini, secara kuantitas, intensitas, maupun kualitas kejahatannya, korupsi yang terjadi di negeri ini sangat jauh berbeda dengan yang terjadi pada masa Nabi saw. Kasus korupsi yang saat ini telah menjelma menjadi masalah nasional yang akut dan telah menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak jarang dilakukan secara sistematis oleh pejabat-pejabat publik dan tokoh-tokoh populer yang seharusnya berdiri pada posisi mereka sebagai ujung tombak bagi terwujudnya institusi yang bersih. Akan tetapi, para pelaku korupsi pada umumnya justru belum mendapatkan sanksi dan perlakuan hukum yang setimpal dengan kejahatan yang mereka lakukan. Sanksi sosial yang diberikan kepada pelaku korupsi pun sangat tidak sebanding dengan apa yang pernah dicontohkan oleh Nabi. Pelaku korupsi pada umumnya justru tidak kehilangan kemerdekaan dan hak-hak sosial mereka, terlebih lagi dengan semakin meningkatnya budaya *permissive* di kalangan masyarakat Indonesia. Tidak sedikit pelaku korupsi bahkan memiliki *privilege* di hadapan hukum, dalam kehidupan sosial dan di ranah politik. Perlakuan masyarakat terhadap pelaku

korupsi dan pelaku tindak kriminal lainnya juga terkesan ambigu. Pelaku pencurian misalnya, tidak jarang mendapat sanksi sosial dalam bentuk penghakiman langsung dari masyarakat, akan tetapi pelaku korupsi justru tidak jarang memperoleh posisi yang "terhormat" secara sosial. Ironisnya, kendati lewat hadisnya Nabi telah memberikan ancaman yang sangat berat bagi pelaku korupsi, banyak kasus korupsi di Indonesia justru dilakukan oleh umat Islam.

Kenyataan ini tentu saja bertentangan dengan spirit beberapa hadis tentang korupsi yang dikutip sebelumnya, yang menegaskan bahwa sanksi yang akan diterima pelaku korupsi di dunia dan di akhirat sesungguhnya sangat berat. Karenanya, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, untuk menangani dan mencegah semakin meluasnya budaya korupsi di Indonesia, melalui pendekatan multidimensional; pendekatan hukum, politik, sosial-budaya, dan pendekatan agama.

Jika dicermati, perangkat perundang-undangan yang tersedia di Indonesia bagi para pelaku korupsi pada dasarnya sudah memadai dan memungkinkan para koruptor dijatuhi hukuman yang paling berat, yakni hukuman mati. Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum melawan korupsi, secara normatif pemerintah Indonesia juga telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain: *Pertama*, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; *Kedua*, Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; *Ketiga*, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; *Keempat*, Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Untuk konteks Indonesia, regulasi terakhir yang dijadikan rujukan dalam menentukan sanksi hukum bagi pelaku korupsi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam pasal 2, dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.³⁹

Menilik berbagai regulasi di atas, dapat ditegaskan bahwa perangkat perundang-undangan yang menjadi landasan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia tampaknya sudah cukup memadai. Hanya saja, jika dicermati lebih jauh, materi perundangan yang ada belum mengatur secara tegas tentang bentuk hukuman korupsi berdasarkan rentang nominal, bentuk kejahatan, dan dampak yang ditimbulkannya. Masih belum tegasnya hukuman bagi pelaku korupsi berdasarkan rentang nominal dan tingkat kejahatan para pelaku korupsi, memunculkan kesan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hukuman pelaku korupsi yang merampas kekayaan negara dalam jumlah yang besar dengan pelaku tindak pidana pencurian dalam jumlah nominal yang kecil.

Kendati Indonesia bukan negara agama, akan tetapi untuk menjamin kepastian hukum terhadap pelaku korupsi, pesan hukum yang terkandung dalam hadis di atas, perlu ditransformasikan untuk menyempurnakan undang-undang menyangkut tindak pidana korupsi di Indonesia. Tindakan Nabi yang menghinakan koruptor dengan tidak mau menyalatkan jenazahnya, padahal jumlah nominal yang dikorupsi sangat kecil, seharusnya juga bisa mengilhami untuk dirumuskannya undang-undang untuk menghinakan para pelaku korupsi, untuk mengantisipasi meluasnya perilaku korupsi sekaligus untuk mendatangkan efek jera bagi para pelakunya. Atas dasar beberapa pertimbangan ini, perumusan regulasi yang lebih teknis menyangkut tindakan korupsi, termasuk sanksi berupa

“pemiskinan koruptor” dan undang-undang perampasan aset⁴⁰ yang akhir-akhir ini sering diwacanakan, merupakan hal yang sangat mendesak untuk dirumuskan. Hal ini dilakukan agar sanksi yang diberikan kepada para pelaku korupsi semakin tegas dan bersesuaian dengan azas keadilan serta dapat memaksimalkan pengembalian aset yang diduga diperoleh melalui hasil korupsi.

Disamping memperkuat materi perundang-undangan, upaya percepatan penanganan korupsi juga harus diikuti dengan kebijakan dan mekanisme yang memungkinkan lahirnya aparat penegak hukum yang memiliki komitmen dan kredibilitas moral untuk melaksanakan perundang-undangan tersebut. Hal ini karena, aparat penegak hukum semestinya menjadi ujung tombak dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan dituntut memiliki tingkat keberanian di atas rata-rata, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menegakkan hukum secara adil tanpa diskriminasi.

Selain pendekatan hukum, upaya menangani kasus korupsi di Indonesia juga bisa dilakukan melalui pendekatan politik. Dalam kaitan ini, *political will* pemerintah untuk melakukan berbagai upaya preventif dan upaya memerangi korupsi secara sungguh-sungguh sangat dibutuhkan. Beberapa usaha untuk hal ini antara lain: pertama, menunjukkan komitmen dan itikad yang baik dalam upaya menciptakan institusi pemerintahan yang bersih dan berwibawa; kedua, memiliki kemampuan untuk membenahi birokrasi secara efektif dan efisien; ketiga, memiliki keberanian untuk memberikan sanksi hukum yang

tegas kepada aparat pemerintahan yang terbukti melakukan korupsi; keempat, mengupayakan proses dan mekanisme rekrutmen dan pembinaan secara sistematis terhadap aparatur negara, yang memungkinkan lahirnya aparatur negara yang jujur, bersih dan amanah dalam melaksanakan tugas; kelima; menjamin terciptanya kondisi-kondisi sistemik dan struktural agar fungsi-fungsi institusi yang terkait dengan pemberantasan korupsi seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bisa optimal dan efektif; keenam, memberikan keteladanan yang baik kepada masyarakat luas, terutama dalam mencontohkan budaya hidup sederhana, sikap amanah, dan konsisten dalam penegakan hukum.

Upaya selanjutnya yang bisa ditempuh untuk menekan perilaku korupsi adalah melalui pendekatan pendidikan. Dalam kaitan ini, lembaga-lembaga pendidikan yang ada dapat dimanfaatkan sebagai media sosialisasi gagasan pendidikan anti korupsi. Pendidikan ini seharusnya dijadikan bagian yang tidak terpisahkan dengan pendidikan karakter dan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang tepat tentang korupsi, sanksi hukum, berikut bahaya dan dampak yang mungkin ditimbulkannya. Hal ini sangat penting dilakukan karena lembaga pendidikan sangat berperan dalam pembinaan moral, pembentukan *mind set*, karakter, serta perilaku seseorang.

Disamping melalui pendekatan hukum, politik dan budaya, pendekatan sosial juga bisa digunakan untuk menekan

budaya korupsi di Indonesia. Upaya ini bisa dilakukan dengan cara memberdayakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat sipil, karena partisipasi dan kontrol dari masyarakat senantiasa dibutuhkan untuk membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Melalui pemanfaatan berbagai media sosialisasi, masyarakat juga perlu diberi ruang untuk memiliki pemahaman yang benar dan tepat tentang korupsi, cara memperlakukan koruptor secara tepat, termasuk kemungkinan untuk memberlakukan sanksi sosial berupa pembatasan hak dan kemerdekaan sosial, berikut "penghinaan sosial" terhadap para koruptor.

Upaya lainnya yang bisa ditempuh untuk menekan angka korupsi di Indonesia adalah melalui pendekatan agama, karena pada dasarnya masyarakat Indonesia adalah masyarakat dengan karakter masyarakat religius. Karenanya, kesadaran untuk menjauhi perilaku korupsi juga bisa dibangun dan digali dari ajaran normatif masing-masing agama, dan idealnya bisa dijadikan bagian yang tidak terpisahkan dari pengajaran dan dakwah keagamaan. Kemungkinan ini sangat terbuka untuk dilakukan karena tidak ada satu pun dari agama formal yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang memberi ruang dan membenarkan perilaku mengumpulkan harta kekayaan dengan cara-cara yang tidak benar dan menyalahi etika agama. Agama Islam misalnya, dengan tegas mengharamkan perilaku mengumpulkan kekayaan dengan cara yang tidak benar. Sanksi hukum yang diberikan pun sangat berat,

baik sanksi yang akan diterima pelakunya di dunia maupun di akhirat kelak.

Kesimpulan

Dari tulisan diatas dapat penulis simpulkan sebagai berikut; Makna asal korupsi (*ghulul*) dalam hadis adalah mengambil harta rampasan perang, sebelum harta tersebut dibagikan. Dalam perkembangannya, korupsi dimaknai mengambil harta atau kekayaan negara, di luar hak yang telah ditetapkan. Dalam perspektif hadis, ancaman bagi pelaku korupsi (*ghulul*) antara lain: 1) Allah akan membelenggu pelaku korupsi, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban, ia akan membawa harta hasil korupsinya pada hari kiamat; 2) pelaku korupsi akan memperoleh kehinaan dan siksa api neraka; 3) Nabi saw. tidak berkenan mensalahkan jenazah yang terlibat korupsi; 4) Allah swt. tidak akan menerima sadaqah seseorang yang bersumber dari harta korupsi. Untuk konteks Indonesia, sanksi hukum bagi pelaku korupsi didasarkan pada dasar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi korupsi di Indonesia, sebagai langkah preventif, dapat dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, meningkat pemahaman dan penerapan etika agama, khususnya menyangkut sifat qanaah dan rasa syukur di tengah gaya hidup konsumtif sebagian masyarakat; *kedua*, meningkatkan kemampuan dalam meminimalisir, menekan, dan menahan diri dari gaya hidup konsumtif dan sifat serakah (tamak) terhadap harta; *ketiga*,

adanya *political will* dari pemerintah dalam memutuskan mata rantai dan memerangi korupsi, baik dalam bentuk keteladanan para pemimpin, pembenahan birokrasi pemerintahan maupun penegakan supremasi hukum.

Referensi

-
- ¹Lihat Q.S. al-Baqarah/2: 208
 - ²Harun Nasution, dan Azyumardi Azra (ed). *Perkembangan Modern dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), h. 2.
 - ³ Lihat Q.S. al-Nisa'/4: 57.
 - ⁴ Lihat Q.S. al-Nisa'/4: 57.
 - ⁵ Lihat Q.S. al-Hujurat/49: 10.
 - ⁶ Lihat Q.S. al-Hujurat/49: 13.
 - ⁷ Lihat Q.S. al-Hujurat/49: 13.
 - ⁸ Lihat Q.S. al-Syura/42: 38; Q.S. Ali 'Imran/3: 159.
 - ⁹ Lihat Q.S. al-Anfal/8: 61.
 - ¹⁰ Lihat Q.S. Ali 'Imran/3: 104.
 - ¹¹Q.S. Al-Ahzab/33: 21.
 - ¹²Q.S. Al-Anbiya/21: 107.
 - ¹³ Abu Dawud Sulaiman bin al-'Asy'as\ al-Sajastani, *Sunan Abi Dawud* (Riyad: Dar al-Ifkar al-Dauliyah, t.t.), h. 396..
 - ¹⁴ Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana korupsi di Indonesia* (Jakarta: Balitbang Depag RI, 2009), h. 42-43.
 - ¹⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Edisi II; Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 527.
 - ¹⁶Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 339.
 - ¹⁷Lihat Baharuddin Lopa, *Masalah Korupsi dan Pemecahannya* (Jakarta: PT Kipas Putih Aksara, 1997), h. 1.
 - ¹⁸Dalam sejarahnya, istilah korupsi pertamakali menjadi istilah teknis yuridis di Indonesia sejak tahun 1957, sejak dirumuskannya Peraturan penguasa Meliter PRT/PM06/1957 tentang pemberantasan korupsi. Dalam peraturan ini istilah korupsi

diartikan sebagai “perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara”. Sedangkan tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan korupsi adalah; 1) setiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun juga untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan keuangan negara; 2) Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah yang bersumber dari keuangan negara ataupun dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan, langsung atau tidak langsung membawa keuntungan atau material baginya. Dalam perkembangan selanjutnya, sejak tahun 1960 lahir beberapa Undang-Undang terkait tindak pidana Korupsi, yakni Undang-Undang No. 24 Prp Tahun 1960; Undang-Undang No.3 Tahun 1971; Undang-Undang No. 31 Tahun 1999; Undang-Undang No. 20 Tahun 2001; Undang-Undang No.7 tahun 2006; dan Undang-Undang No. 46 Tahun 2006. Lihat, Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2005) h.208.

¹⁹ Abu Husein Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, jilid 2 (Riyad: Dar Tayyibah, 2006), h. 890.

²⁰ Abu Dawud, *op.cit.*, h. 396.

²¹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal* (Riyad: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 1998), h. 935.

²² *Ibid.*

²³ Lihat Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

²⁴ Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat tujuh macam kelompok delik korupsi dan unsur-unsurnya. *Pertama*, tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dijelaskan dalam pasal

2 ayat (1), unsur-unsurnya meliputi: pelaku manusia atau korporasi; melawan hukum; memperkaya diri sendiri; dan, dapat merugikan negara dan perekonomian negara. *Kedua*, Tindak Pidana Korupsi Penyuaapan (Pasal 5 ayat [1] huruf a dan b; Pasal 5 ayat (2); Pasal 6 ayat [1] huruf a dan b; Pasal 6 ayat [2]). *Ketiga*, Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan Pembangunan, Leveransir dan Rekanan (Pasal 7 ayat [1] huruf a, b, c dan d; Pasal 7 ayat [2]); *Keempat*, Tindak Pidana Korupsi Penggelapan (Pasal 8, 9, dan 10). *Kelima*, Tindak Pidana Korupsi Memberi dan Menerima Hadiah (Pasal 11; 12 huruf a, b, c dan d; Pasal 13). *Keenam*, Tindak Pidana Korupsi Kerakusan (Pasal 12 huruf e, f, g, h dan i). *Ketujuh*, Tindak Pidana Korupsi tentang Gratifikasi (Pasal 12B). Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Op.cit.*, h. 17-30.

²⁵ Abu Dawud, *op.cit.*, h. 396.

²⁶ Al-Ragib al-Asfahani, *Mufradat Alfazh al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 375; Louis Ma'luf, *Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1988), h. 556.

²⁷ Ibrahim Anis, *Al-Mu'jam al-Wasith*, (Mesir: t.p., 1972), h. 659.

²⁸ Rawas Qala'arji dan Hamid Sadiq Qunaybi, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha* (Beirut: Dar al-Nafis, 1985), h. 334.

²⁹ Muhyiddin Abi Zakariyya Al-Nawawiy, *Sahih Muslim bi Syarh al-Nawawiy*, (Cet. I; Kairo: al-Maktaba al-Saqafi, 2001), h. 216.

³⁰ Muhammad Syams al-Haq al-'Azhim al-Abadi, *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*, juz 2 (Cet. I; Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005), h. 1624.

³¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, edisi tahun 2002 (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), h. 72.

³² Sebagaimana dikutip M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, vol. 2 (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 319.

³³ *Ibid.*

³⁴Abu Dawud, *op.cit.*, h. 306; Muhammad Syams al-Haq al-Azhim Abadi, 'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud, (Cet. I; Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005), h. 1224; Khalil Ahmad al-Siharanfuri, *Badzlu al-Majhud fi Halli Abi Dawud*, jilid 11, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), h. 284-286.

³⁵ Al-Bukhari, *op.cit.*, h. 1038-1039.

³⁶Abu Dawud, *op.cit.*, h. 31.

³⁷ Hal ini relevan dengan Q.S. Ali 'Imran ayat 161. Terkait penafsiran ayat "pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya", menurut sebagian ulama mengandung arti membawa dosa akibat khianatnya. Sebagian ulama menafsirkan dengan pemahaman hakiki, yakni mereka benar-benar memikul di punggungnya apa yang dia ambil dengan cara khianat. Dia disiksa dengan bebannya itu dan dipermalukan di hadapan banyak orang. M. Quraish Shihab, *op.cit.*, vol. 2, h. 320.

³⁸Al-Nawawi, *Syarh Muslim, op.cit.*, h. 216.

³⁹ Ketentuan lainnya tentang tindak pidana korupsi ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, berikut ini: *Pertama*, Pasal 8 yang menyebutkan: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.; *Kedua*, Pasal 10 a, Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau

orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja: menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya.

⁴⁰Undang-Undang Perampasan Aset diperlukan karena penggunaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kurang efektif dalam memaksimalkan pengembalian uang negara dalam penanganan kasus korupsi. Dengan menggunakan undang-undang ini jaksa dan hakim hanya bisa menyita uang yang benar-benar bisa dibuktikan korupsinya. Melalui Undang-Undang perampasan aset diharapkan penegak hukum dapat merampas aset seseorang yang diduga memiliki harta dari hasil korupsi, meskipun belum ada bukti bahwa seseorang itu melakukan korupsi.